

**RENCANA KERJA
DISDAGPERIN KOTA BEKASI
TAHUN 2022**



**Komplek Perkantoran Walikota Bekasi
Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bekasi**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Bekasi Tahun 2022 disusun sebagai landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan dan dijadikan pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022. RKPD tahun 2022 memuat prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja serta kerangka anggaran pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang berupa stimulan pembangunan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu tahapan dalam rangkaian perencanaan pembangunan daerah, RKPD tidak terlepas dari dokumen dan proses perencanaan di atasnya atau yang mendahuluinya. Dalam hal ini RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2020–2023 yang merupakan arah dan kebijakan pembangunan Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun dan Renstra SKPD. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) disusun untuk bersinergi dengan RKPD Kota Bekasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bekasi.

RPJMD Kota Bekasi Periode 2018-2023 mengusung visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan; dengan misi pembangunan Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;

5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan mempedomani visi Wali Kota Bekasi yaitu Kota Bekasi; Dinas Dagperin melaksanakan **misi ke-1 dan misi ke-3** Wali Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.

Misi pertama bermakna bahwa tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, pengembangan layanan publik berbasis IT, serta dengan menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Misi ketiga memiliki makna bahwa fokus pemerintah adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing Kota Bekasi menjadi lebih meningkat. Pendekatan lainnya adalah dengan pemberian fasilitasi peningkatan kompetensi serta sertifikasi bagi pencari kerja maupun pelaku usaha, aktivasi kelembagaan koperasi, serta pengelolaan pasokan sembako berbasis IT.

Arah kebijakan umum di tahun 2022 antara lain: pengelolaan database berbasis IT, pembinaan dan penguatan jejaring pasar ekspor; pengembangan dan reorientasi industri kreatif; melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha perdagangan; mengembangkan pasar rakyat; mengembangkan pilot project pasar rakyat berbasis modern dan bersih; meningkatkan penyerapan dan penerapan teknologi tepat guna oleh industri kecil dan menengah;

memberikan dukungan pendampingan bagi industri kecil yang baru berkembang; dan meningkatkan perlindungan konsumen dan pelayanan kemetrolagian.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformulasi terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan yang ada untuk menjaga kesesuaian dan keselarasan arah pembangunan serta untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 tetap mengarah pada visi, misi dan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi adalah sebagai dokumen perencanaan Disdagperin untuk 1 (satu) periode tahun anggaran.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Disdagperin adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdagperin tahun anggaran 2022 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra

Pada tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.29.359.511.500.

Sumber dana kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2021 sebesar Rp.29.359.511.500 bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.29.209.511.500; dan
2. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.150.000.000.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi disajikan pada tabel berikut:



**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
(Sesuai Renstra Setelah Perubahan RPJMD)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Fasilitas yang Diberikan pada IKM	3%	5,34%	178%
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Fasilitas yang Diberikan pada IKM	100%	100%	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM yang difasilitasi berupa sarana dan prasarana	-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan	-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah pola kerjasama industri yang terbentuk	3 IKM	3 IKM	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Kota Bekasi	USD 450.000.000	USD 480.609.228	106,80%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan penunjang peningkatan ekspor	-	-	-
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran yang diikuti	-	-	-
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran yang diselenggarakan	-	-	-
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	-	-	-
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	4%	23,50%	587,50%
	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang	100%	100%	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	14.205 unit	16.707 unit	117,61%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/penyuluhan yang diselenggarakan	6 kali	6 kali	100%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	8 pasar	8 pasar	100%
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana kebersihan pasar yang tersedia	-	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	-	-	-
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jenis alat kebersihan yang disediakan	-	-	-
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola pasar yang diberdayakan	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar yang diberdayakan	3.480 orang	3.480 orang	%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	<4%	0,88%	100%
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Titik Pengawasan Stok dan harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 kecamatan	12 kecamatan	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah event pasar murah yang diselenggarakan	12 titik	12 titik	100%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dipantau	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya tata pemerintahan yang baik	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga	221 stel	221 stel	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan premi BPJS yang dibayarkan	1.968 orang/bulan	1.968 orang/bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibuat	15 eksemplar	15 eksemplar	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic yang disediakan	3.312 unit 1.012 pak	3.312 unit 1.012 pak	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	1.283 unit	1.283 unit	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 kali	60 kali	100%
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terpelihara	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	23 unit	23 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	26 unit	26 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran, dan tenaga kebersihan	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayarkan	12 rekening/bulan	12 rekening/bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran, dan tenaga kebersihan	516 orang/bulan 36 orang/bulan	516 orang/bulan 36 orang/bulan	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen	100%

Secara keseluruhan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan Disdagperin sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu realisasi fisik sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar 94,94%. Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% dikarenakan adanya pengembalian belanja (saldo anggaran lebih).

Capaian Indikator Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021

No	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target dan Capaian		Capaian
				Target 2021	Realisasi 2021	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik	Nilai AKIP	74	71,86	97,11%
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	%	3	5,34	178,00%
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pertumbuhan Alat UTP yang di Tera/Tera Ulang	%	4	23,50	587,50%
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	Unit	8	8	100%
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	%	<4	0,88	100%

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar Indikator Program pada Disdagperin tercapai. Dari 5 indikator yang telah ditetapkan, 4 diantaranya berhasil dicapai. Berikut adalah uraian dan keterangan dari masing-masing indikator:

1. Indikator Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memperoleh nilai 71,86 atau predikat “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu Akuntabilitas kinerjanya sudah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai SAKIP Disdagperin tersebut masih di bawah target 74. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan terdapat penurunan capaian indikator sasaran (IKU) Disdagperin tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif sebesar -0,12 dan indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebesar -3,6.

2. Indikator Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah

Capaian target Program Perencanaan dan Pembangunan Industri tahun 2021 mencapai 5,34. Sedangkan capaian indikator Persentase Peningkatan Fasilitas Terhadap Industri Kecil dan Menengah adalah sebesar 178,00%, dimana jumlah fasilitas yang diberikan kepada IKM tahun 2020 adalah 1.011 IKM dan tahun 2021 adalah 54 IKM.

3. Indikator Persentase Peningkatan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang

Capaian target alat UTTP yang ditera/tera ulang tahun 2021 adalah sebesar 23,50% dari perbandingan capaian target 16.707 unit dibandingkan dengan target 13.528 unit. Sedangkan capaian indikator Persentase Peningkatan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang adalah sebesar 587,50% yang merupakan perbandingan capaian target 2021 sebesar 23,50% dengan target peningkatan sebesar 4%.

Dapat disimpulkan pencapaian Disdagperin cukup baik, yang ditunjang oleh penambahan SDM yang semakin profesional sehingga potensi-potensi peneraan pada alat UTTP di Kota Bekasi dapat dimaksimalkan.

4. Indikator Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern

Capaian jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern adalah 8 unit pasar dari keseluruhan target 8 unit pasar atau 100%. Dapat disimpulkan bahwa Disdagperin dapat memaksimalkan SDM yang bertugas di unit pasar melalui kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

5. Indikator Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan

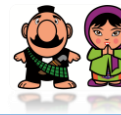
Realisasi indikator program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilihat dari terlaksananya program pasar murah. Adapun realisasi fisik program ini mencapai 100% karena pada bulan April (triwulan II) telah terlaksana sub kegiatan penyelenggaraan pasar murah di 6 titik. Berdasarkan data BPS Kota Bekasi bahwa laju inflasi tahun 2021 adalah 0,32, atau masih di bawah inflasi 4%, sehingga dapat diartikan bahwa inflasi di Kota Bekasi tahun 2021 masih terkendali.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Disdagperin juga dibebankan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut:



**Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi	Proyeksi	
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	-	73	74	75	76	71,86	75	76
2	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah	6%	7%	8%	9%	10%	5,88	9%	10%
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	1,5%	4,5%	4%	4%	4%	4,06	4%	4%
4	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	Indikator belum ditetapkan	Indikator belum ditetapkan	100%	100%	100%	617,06	100%	100%

1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memperoleh nilai 71,86 atau predikat “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu Akuntabilitas kinerjanya sudah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai SAKIP Disdagperin tersebut masih di bawah target 74. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan terdapat penurunan capaian indikator sasaran (IKU) Disdagperin tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif sebesar -0,12 dan indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebesar -3,6.

2. Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi

Indikator keberhasilan dari sasaran ini yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif dengan target peningkatan sebesar 8% untuk tahun 2021. Target tahun 2021 pada indikator sasaran tersebut tidak mencapai 100% dengan realisasi pertumbuhan sebesar 5,88%, hal ini berarti capaian kinerja hanya mencapai 73,49%. Pertumbuhan sebesar 5,88% tersebut merupakan hasil perbandingan PDRB sektor industri pada tahun 2021 yang menyumbang sebesar Rp.34.471,94 miliar, dengan PDRB sektor industri pada tahun 2020 sebesar Rp.32.557,78 miliar. Data tersebut seluruhnya diambil dari BPS Kota Bekasi. Jika dibandingkan dengan target dan capaian pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni target 7% dan realisasi -0,29% maka untuk tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari realisasi yang sebelumnya minus, mampu mencapai pertumbuhan sebesar 5,88%.

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya Indikator sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif adalah pandemi Covid-19. Pandemi virus Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sektor Industri, seperti misalnya penurunan produksi dan penjualan, penurunan permintaan, serta pengurangan tenaga kerja akibat penurunan produksi.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan PDRB sektor industri Kota Bekasi tahun 2021 sebesar 5,88% masih di bawah

pertumbuhan PDRB sektor industri nasional, dimana PDRB sektor industri nasional mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 6,48% dengan angka sebesar Rp.3.266.903,5 miliar, dimana pada tahun 2020 PDRB sektor industri nasional mencatatkan angka sebesar Rp.3.068.041,7 miliar. Adapun sektor industri di Kota Bekasi menyumbang sekitar 1,06% terhadap PDRB sektor industri nasional. Angka ini cukup besar jika melihat rata-rata kabupaten/kota di Indonesia menyumbang sebesar 0,19%. Penghitungan didasarkan pada nilai PDRB sektor industri nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 wilayah sehingga dicapai rata-rata besaran PDRB sektor industri sebesar Rp.6.355,8 miliar per kabupaten/kota, jauh di bawah PDRB sektor industri di Kota Bekasi sebesar Rp.34.471,94 miliar. Seluruh data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Target indikator sasaran tidak tercapai dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan/kendala seperti belum adanya pelaksanaan sensus industri. Untuk menunjang capaian indikator sasaran di tahun-tahun berikutnya maka akan dilakukan sensus terhadap industri sehingga dapat diketahui sebaran serta pemetaan terhadap industri di Kota Bekasi yang mana akan dilakukan pembinaan, pelatihan, monitoring serta fasilitasi, khususnya terhadap industri kecil yang berguna dalam perkembangan dan pertumbuhan industri di Kota Bekasi.

3. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi

Indikator keberhasilan dari sasaran ini yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan target peningkatan sebesar 4% per tahun. Target tahun 2021 pada indikator sasaran tersebut tercapai dengan realisasi pertumbuhan sebesar 4,06%. Hal ini berarti capaian kinerja mencapai 101,54%. Pertumbuhan sebesar 4,06% tersebut merupakan hasil perbandingan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2021 yang menyumbang sebesar Rp.22.171,80 miliar, dengan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2020 sebesar Rp.21.306,41. Data tersebut seluruhnya diambil dari BPS Kota Bekasi. Jika dibandingkan dengan target dan capaian pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni target 4,5% per tahun dan realisasi (3,63)% maka untuk tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari realisasi yang sebelumnya minus, mampu mencapai pertumbuhan sebesar 4,06%.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kota Bekasi tahun 2021 sebesar 4,06% cukup jauh di bawah pertumbuhan PDRB sektor perdagangan nasional yang mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 10,35% dengan angka sebesar Rp.2.200.528,90 miliar. Dimana pada tahun 2020, PDRB sektor perdagangan nasional mencatatkan angka sebesar Rp.1.994.125,30 miliar. Adapun sektor perdagangan di Kota Bekasi menyumbang sekitar 1,01% terhadap PDRB sektor perdagangan nasional. Angka ini cukup besar jika melihat rata-rata kabupaten/kota di Indonesia menyumbang sebesar 0,19%. Penghitungan didasarkan pada nilai PDRB sektor perdagangan nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 wilayah sehingga dicapai rata-rata besaran PDRB sektor perdagangan sebesar Rp.4.281,2 miliar per kabupaten/kota, sangat jauh dibawah PDRB sektor perdagangan di Kota Bekasi sebesar Rp.22.171,80 miliar. Seluruh data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pandemi COVID 19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sektor perdagangan di Kota Bekasi. Akan tetapi tahun 2021 sektor perdagangan di Kota Bekasi mulai pulih, hal ini ditandai dengan kenaikan daya beli dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, serta mulai adanya kelonggaran mobilitas di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, restoran atau rumah makan yang mulai membuka usahanya kembali.

Untuk menunjang capaian indikator sasaran di tahun-tahun berikutnya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan mendukung pelaku usaha yang berorientasi ekspor melalui kegiatan promosi maupun sosialisasi untuk pelaku usaha ekspor sehingga akses pasar keluar negeri makin terbuka. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga akan meningkatkan sektor pelayanan dalam rangka melindungi konsumen terkait standarisasi melalui pelaksanaan dan pengawasan tera/tera ulang. Dalam upaya meningkatkan sarana distribusi perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dalam bentuk fasilitasi dan penyediaan sarana distribusi perdagangan. Hal ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi, baik penjual maupun pembeli sebagai konsumen akan ketersediaan pasar rakyat bersih yang berbasis modern.

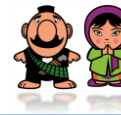
4. Sasaran Tersedianya Kelompok Bahan Pokok

Indikator keberhasilan dari sasaran ini yaitu Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok dengan target sebesar 100% per tahun. Target pada indikator sasaran untuk tahun 2021 dapat tercapai dengan realisasi sebesar 617,06%, dimana ketersediaan kelompok bahan pokok sebesar 5.108.966,34 kg/hari, sedangkan kebutuhan kelompok bahan pokoknya adalah sebesar 827.955 kg/hari. Data tersebut bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Ketersediaan bahan pokok adalah kondisi tersedianya bahan pokok dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Bahan pangan pokok terdiri dari 11 jenis, yaitu: beras, jagung, bawah merah, bawah putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Selain memantau dan mengawasi ketersediaan kelompok bahan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memantau harga kelompok bahan pokok setiap hari.

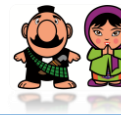


2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD (Permendagri Nomor 40 Tahun 2020)

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya tata pemerintahan yang baik	-		26.501.969.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya tata pemerintahan yang baik	-		26.321.969.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		520.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		520.000.000	
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga	708 set	Kota Bekasi	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga	708 set	Kota Bekasi	500.000.000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	4 orang	Kota Bekasi	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	4 orang	Kota Bekasi	20.000.000	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminsitration Keuangan Perangkat Daerah	-		22.700.713.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminsitration Keuangan Perangkat Daerah	-		22.700.713.000	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan premi BPJS yang dibayarkan	1.968 orang/bulan	Kota Bekasi	22.685.713.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan premi BPJS yang dibayarkan	1.968 orang/bulan	Kota Bekasi	22.685.713.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang dibuat	3 Dokumen	Kota Bekasi	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang dibuat	3 Dokumen	Kota Bekasi	15.000.000	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	-		650.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	-		620.000.000	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibuat	25 eksemplar	Kota Bekasi	45.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibuat	25 eksemplar	Kota Bekasi	45.000.000	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic yang disediakan	4.324 unit	Kota Bekasi	170.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic yang disediakan	4.324 unit	Kota Bekasi	170.000.000	

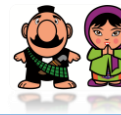


RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	1.283 unit	Kota Bekasi	125.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	1.283 unit	Kota Bekasi	125.000.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 kali	Kota Bekasi	280.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 kali	Kota Bekasi	280.000.000	
13	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata	-	Kota Bekasi	30.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata	-	Kota Bekasi	0	
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-		150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-		0	
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	Kota Bekasi	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	Kota Bekasi	0	
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		195.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		195.000.000	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terpelihara	26 unit	Kota Bekasi	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terpelihara	26 unit	Kota Bekasi	20.000.000	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	23 unit	Kota Bekasi	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	23 unit	Kota Bekasi	175.000.000	
19	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	4 unit	Kota Bekasi	-	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara/ terrehabilitasi	4 unit	Kota Bekasi	0	

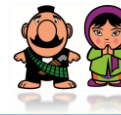


RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran, dan tenaga kebersihan	552 orang		2.271.256.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran, dan tenaga kebersihan	552 orang		2.271.256.000	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayarkan	12 rekening/bulan	Kota Bekasi	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayarkan	12 rekening/bulan	Kota Bekasi	100.000.000	
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran, dan tenaga kebersihan	552 orang	Kota Bekasi	2.171.256.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran, dan tenaga kebersihan	552 orang	Kota Bekasi	2.171.256.000	
23	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	3 Dokumen		15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	3 Dokumen		15.000.000	
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	3 Dokumen	Kota Bekasi	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	3 Dokumen	Kota Bekasi	15.000.000	
J U M L A H					26.501.969.000	J U M L A H					26.321.969.000

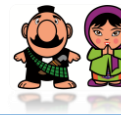
RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BELANJA LANGSUNG URUSAN											
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Fasilitas yang Diberikan pada IKM	3%		810.000.000	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Fasilitas yang Diberikan pada IKM	3%		150.000.000	
2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Fasilitas yang Diberikan pada IKM	3%		810.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Fasilitas yang Diberikan pada IKM	3%		150.000.000	



RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM yang difasilitasi berupa sarana dan prasarana	3%	Kota Bekasi	300.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM yang difasilitasi berupa sarana dan prasarana	3%	Kota Bekasi	0	
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan	3%	Kota Bekasi	300.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan	3%	Kota Bekasi	0	
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah pola kerjasama industri yang terbentuk	3%	Kota Bekasi	210.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah pola kerjasama industri yang terbentuk	3%	Kota Bekasi	150.000.000	
6	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bekasi	USD 500.000.000		380.000.000	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bekasi	USD 500.000.000		0	
7	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan penunjang peningkatan ekspor	USD 500.000.000		380.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan penunjang peningkatan ekspor	USD 500.000.000		0	
8	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran yang diikuti	1 event	Kota Bekasi	150.000.000	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran yang diikuti	1 event	Kota Bekasi	0	
9	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran yang diselenggarakan	1 event	Kota Bekasi	130.000.000	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran yang diselenggarakan	1 event	Kota Bekasi	0	
10	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	50 pelaku usaha	Kota Bekasi	100.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	50 pelaku usaha	Kota Bekasi	0	



RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	23.150 unit (14%)		860.000.000	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	23.150 unit (14%)		250.000.000	
12	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang	23.150 unit (14%)		860.000.000	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang	23.150 unit (14%)		250.000.000	
13	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	23.150 unit (14%)	Kota Bekasi	260.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	23.150 unit (14%)	Kota Bekasi	147.092.500	
14	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/penyuluhan yang diselenggarakan	6 kali	Kota Bekasi	600.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/penyuluhan yang diselenggarakan	6 kali	Kota Bekasi	102.907.500	
15	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	10 unit		610.000.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	10 unit		4.338.300.000	
16	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana kebersihan pasar yang tersedia	-		430.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana kebersihan pasar yang tersedia	-		0	
17	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	10 pasar	Kota Bekasi	220.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	10 pasar	Kota Bekasi	0	
18	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jenis alat kebersihan yang disediakan	6 jenis	Kota Bekasi	210.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jenis alat kebersihan yang disediakan	6 jenis	Kota Bekasi	0	
19	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola pasar yang diberdayakan	290 orang		180.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola pasar yang diberdayakan	290 orang		4.338.300.000	



RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar yang diberdayakan	290 orang	Kota Bekasi	180.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar yang diberdayakan	290 orang	Kota Bekasi	4.338.300.000	
21	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	< 4 %		780.000.000	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	< 4 %		100.000.000	
22	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Titik Pengawasan Stok dan harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 event		100.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Titik Pengawasan Stok dan harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 event		100.000.000	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah event pasar murah yang diselenggarakan	1 event	Kota Bekasi	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah event pasar murah yang diselenggarakan	1 event	Kota Bekasi	100.000.000	
24	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	18 barang		680.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	18 barang		0	
25	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dipantau	18 barang	Kota Bekasi	680.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dipantau	18 barang	Kota Bekasi	0	
J U M L A H					3.440.000.000	J U M L A H					4.838.300.000



2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perencanaan tahun anggaran 2021, Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak mendapatkan usulan program dan kegiatan baik dari masyarakat maupun pokok pikiran DPRD .

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Agar keseimbangan terjadi maka komitmen pembangunan ekonomi harus diarahkan pada keberpihakan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Misi Ke-1 (Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan Misi ke-3 (Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing) pada Pembangunan Kota Bekasi.

Misi pertama bermakna bahwa tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, pengembangan layanan publik berbasis IT, serta dengan menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Misi ketiga memiliki makna bahwa fokus pemerintah adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing Kota Bekasi menjadi lebih meningkat. Pendekatan lainnya adalah dengan pemberian fasilitasi peningkatan kompetensi serta sertifikasi bagi pencari kerja maupun pelaku usaha, aktivasi kelembagaan koperasi, serta pengelolaan pasokan sembako berbasis IT.

Adapun untuk mencapai misi Kota Bekasi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menetapkan tujuan dinas. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun implementasi dari misi dinas. Tujuan pembangunan yang ingin dicapai dinas pada periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sektor perekonomian yang berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Ekonomi kreatif merupakan fokus utama Kota Bekasi dalam meningkatkan perekonomian Kota Bekasi dimana Kota Bekasi diketahui memiliki potensi yang cukup besar pada sektor industri kreatif. Sebagai contoh untuk saat ini terdapat industri boneka dan bordir yang cukup berkembang pesat. Beberapa potensi lainnya yang perlu digali dan dikembangkan antara lain industri fashion, teknologi dan informasi, alat peraga, dan lainnya.

2. Memperkuat daya saing sektor perdagangan;

Inflasi terhadap kebutuhan barang pokok kerap terjadi menjelang hari-hari besar, oleh karena itu fokus utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah menjaga kestabilan harga barang pokok melalui bentuk koordinasi dan operasi pasar murah di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Sementara itu dalam hal ekspor daerah, Kota Bekasi melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Saat ini terjadi pergeseran tren belanja masyarakat Kota Bekasi seiring dengan pertumbuhan mall dan pasar/toko modern di Kota Bekasi sehingga masyarakat cenderung berbelanja di mall dan pasar/toko modern dibandingkan di pasar rakyat. Menyikapi hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian berusaha meningkatkan dan mengelola sarana distribusi perdagangan dengan meningkatkan pasar-pasar yang ada di Kota Bekasi menjadi pasar yang berbasis modern. Hal tersebut diharapkan mampu menaikkan minat masyarakat untuk tetap berbelanja di pasar rakyat. Bagaimanapun juga, pasar rakyat merupakan penggerak roda perekonomian daerah dengan berbasis ekonomi kerakyatan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu melalui kegiatan peneraan terhadap alat UTTP. Peneraan tersebut dilakukan agar ketepatan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya dapat terkalibrasi dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.



Sedangkan sasaran pengembangan jangka menengah adalah indikator dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara usaha nyata oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai aturan APBD.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran pengembangan jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan akuntabilitas pelayanan pada Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	-	73,43 (BB)	74 (BB)	75 (A)	76 (A)
2	Meningkatkan sektor perekonomian yang berbasis industri kreatif	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah	6%	7%	8%	9%	10%
3	Memperkuat daya saing sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	1.5 %	4.5 %	4 %	4 %	4 %
4	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat	Persentase ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	Indikator belum ditetapkan	Indikator belum ditetapkan	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang dikelompokkan ke dalam: (1) perumusan kebijakan; (2) pelayanan dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan misi ke-1 dan misi ke-3 Kota Bekasi yaitu Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik dan Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing, serta berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dan tugas pokok dan fungsi dinas, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebanyak 6 (enam) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kerja, maka pada tahun 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi akan melaksanakan 5 Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan 1 Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Program-program tersebut antara lain sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Adapun kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 13 kegiatan. Total anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp31.648.801.783**. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
 - Jumlah Program : 5
 - Jumlah Kegiatan : 12
 - Jumlah Sub Kegiatan : 23
 - Pagu Anggaran : Rp31.325.801.783
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
 - Jumlah Program : 1
 - Jumlah Kegiatan : 1
 - Jumlah Sub Kegiatan : 1
 - Pagu Anggaran : Rp323.000.000



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDAGPERIN
TAHUN ANGGARAN 2022
KOTA BEKASI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				31.325.801.783				31.325.801.783
3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksanakannya Tata Pemerintahan yang Baik			26.092.814.605				26.092.814.605
3.30.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000				15.000.000
3.30.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang Tersusun	3 Dokumen	Kota Bekasi	15.000.000	PAD		3 Dokumen	15.000.000
3.30.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.852.654.000				21.852.654.000
3.30.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Premi BPJS	100%	Kota Bekasi	21.842.654.000	PAD		100%	21.842.654.000
3.30.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Tahunan	2 Dokumen	Kota Bekasi	10.000.000	PAD		2 Dokumen	10.000.000
3.30.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			220.000.000				220.000.000
3.30.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kota Bekasi	20.000.000	PAD		4 Orang	20.000.000
3.30.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	230 Orang	Kota Bekasi	200.000.000	PAD		230 Orang	200.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.014.100.000				1.014.100.000
3.30.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer - Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu SKPD yang Disediakan	7.000 Unit 1.140 Pack	Kota Bekasi	170.000.000	PAD		7.000 Unit 1.140 Pack	170.000.000
3.30.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	4.500 Unit	Kota Bekasi	484.100.000	PAD		4.500 Unit	484.100.000
3.30.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	9.125 Eksemplar	Kota Bekasi	50.000.000	PAD		9.125 Eksemplar	50.000.000
3.30.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Perjalanan Daerah	800 Kali	Kota Bekasi	280.000.000	PAD		800 Kali	280.000.000
3.30.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Peralatan Penataan Arsip - Jumlah Ruang Penataan Arsip	2 Unit 1 Unit	Kota Bekasi	30.000.000	PAD		2 Unit 1 Unit	30.000.000
3.30.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			150.000.000				150.000.000
3.30.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Mesin Komputer - Jumlah Mesin Printer - Jumlah Mesin Scanner	6 Unit 7 Unit 1 Unit	Kota Bekasi	150.000.000	PAD		6 Unit 7 Unit 1 Unit	150.000.000
3.30.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.446.060.605				2.446.060.605
3.30.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayarkan	12 Rekening/ Bulan	Kota Bekasi	100.000.000	PAD		12 Rekening/ Bulan	100.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran yang dibayarkan yang disediakan - Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	69 Orang/ Bulan 3 Orang/ Bulan	Kota Bekasi	2.346.060.605	PAD		69 Orang/ Bulan 3 Orang/ Bulan	2.346.060.605
3.30.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			395.000.000				395.000.000
3.30.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	15 Unit	Kota Bekasi	175.000.000	PAD		15 Unit	175.000.000
3.30.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	30 Unit	Kota Bekasi	20.000.000	PAD		30 Unit	20.000.000
3.30.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang Terpelihara/ Terehabilitasi	2 Unit	Kota Bekasi	200.000.000	PAD		2 Unit	200.000.000
3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern			4.622.987.178				4.622.987.178
3.30.3.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Petugas Kebersihan Pasar yang Tersedia			444.354.500				444.354.500
3.30.3.2.01.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana kebersihan pasar yang disediakan	6 Jenis	Kota Bekasi	220.000.000	PAD		6 Jenis	220.000.000
3.30.3.2.01.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- FS pasar yang disusun - Jumlah aplikasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dibuat	1 Dok FS 1 Aplikasi	Kota Bekasi	224.354.500	PAD		1 Dok FS 1 Aplikasi	224.354.500
3.30.3.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Pasar yang Diberdayakan			4.178.632.678				4.178.632.678
3.30.3.2.02.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Pasar yang diberdayakan	285 Orang/ Bulan	Kota Bekasi	4.178.632.678	PAD		285 Orang/ Bulan	4.178.632.678



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				250.000.000				250.000.000
3.30.4.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pengawasan Stok dan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			250.000.000				250.000.000
3.30.4.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pasar murah yang diselenggarakan	12 Lokasi	Kota Bekasi	250.000.000	PAD		12 Lokasi	250.000.000
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan			110.000.000				110.000.000
3.30.5.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Peningkatan Ekspor			110.000.000				110.000.000
3.30.5.2.01.6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi/ pelatihan tentang ekspor	50 Pelaku Usaha	Kota Bekasi	110.000.000	PAD		50 Pelaku Usaha	110.000.000
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang			250.000.000				250.000.000
3.30.6.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang			250.000.000				250.000.000
3.30.6.2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	- Jumlah Alat yang ditera/tera ulang - Persentase alat kemetrolagian yang terstandar - Tersedianya sistem informasi pelayanan tera/tera ulang	21.840 UTTP 100% 1 Sistem	Kota Bekasi	195.400.000	PAD		21.840 UTTP 100% 1 Sistem	195.400.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.6.2.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Penyuluhan Kemetrolagian	6 Kali	Kota Bekasi	54.600.000	PAD		6 Kali	54.600.000
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				323.000.000				323.000.000
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah			323.000.000				323.000.000
3.31.2.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitas yang diberikan pada IKM			323.000.000				323.000.000
3.31.2.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Kota Bekasi yang mengikuti Workshop E-Bisnis	300 IKM	Kota Bekasi	323.000.000	PAD		300 IKM	323.000.000
TOTAL					31.648.801.783				31.648.801.783

Pada Rencana Kerja Tahun 2022 ini, Disdagperin melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2019-2023, sesuai RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2019-2023 yakni pada Misi I dan Misi III. Misi I yakni Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Misi III yakni Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjang program prioritas yang berkaitan dengan tupoksi Disdagperin dengan 4 (empat) tujuan sebagai tindak lanjut dari Misi I dan Misi III Kota Bekasi tersebut, yakni:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan pada Disdagperin;
2. Meningkatkan Sektor Perekonomian yang Berbasis Industri Kreatif;
3. Memperkuat Daya Saing Sektor Perdagangan;
4. Menjamin Ketersediaan Bahan Kebutuhan Masyarakat.

Keempat tujuan tersebut di atas yang kemudian diuraikan menjadi 6 (enam) program kegiatan sesuai Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disdagperin Tahun Anggaran 2022 di atas yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Disdagperin pada tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2022 adalah dokumen perencanaan yang sangat strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini merupakan pula keberhasilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menyelenggarakan pemerintahan. Karenanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengikat sinergi bidang-bidang dalam menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran dan target Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan juga dijadikan landasan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Berdasarkan hal di atas, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 memerlukan langkah-langkah strategis dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang-bidang;
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban untuk melaksanakan Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2022;
3. Melakukan pengelompokan indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan urusan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
4. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 guna menjaga kesesuaian administrasi penganggaran dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022.



Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.

Bekasi, 2021

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI,



Drs. TEDI HAFNI TRESNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621021 198503 1 004